



Preferensi Politik Pemilih Muslim di Bali; Perspektif Perilaku dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2024

Bandiyah

Universitas Udayana, Bali, Indonesia

Corresponding Author: dyah_3981@unud.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis preferensi politik pemilih muslim di Bali dalam pemilihan anggota DPRD dan DPR RI dengan pendekatan behavioral. Sebagai kelompok minoritas, umat Muslim di Bali menghadapi tantangan representasi politik yang berbeda dibanding daerah mayoritas. Penelitian menggunakan quasi mixed methods dengan menjadikan hasil survey sebagai data primer dan kajian literatur sebagai data sekunder. Literatur memberikan kerangka teoritis tentang perilaku pemilih melalui model sosiologis, psikologis, dan rasional serta kajian politik konteks Bali. Survei terhadap 70 responden Muslim di Bali memberikan data empiris mengenai pola pilihan politik. Hasil analisis survey menunjukkan bahwa dimensi sosiologis lebih dominan dibanding psikologis dan rasional-ekonomi, dengan rata-rata tertinggi (32,89). Identitas agama, latar belakang pendidikan, serta ikatan organisasi tetap menjadi pertimbangan utama dalam memilih calon legislatif. Namun, pemilih juga memiliki fleksibilitas dengan menerima calon dari partai nasionalis maupun non-Muslim apabila program dan rekam jejak dianggap relevan. Temuan ini menunjukkan bahwa preferensi politik pemilih Muslim di Bali bersifat multidimensi dan pragmatis. Identitas tetap penting, tetapi rasionalitas pragmatis juga berperan. Hal ini dipengaruhi oleh integrasi "menyama braya" sebagai strategi pertahanan diri untuk menggeser statusnya dari "liyan" *the other* menjadi saudara dengan menerima calon non muslim sebagai representasi politiknya.

Kata kunci: Preferensi Politik, Pemilih Muslim, Perilaku Pemilih, Bali, DPRD, DPR RI

Abstract

This study analyses the political preferences of Muslim voters in Bali in the elections for members of the Regional Representative Council (DPRD) and the House of Representatives (DPR RI) using a behavioural approach. As a minority group, Muslims in Bali face different political representation challenges compared to majority areas. The study uses quasi mixed methods, with survey results as primary data and literature review as secondary data. The literature provides a theoretical framework on voter behaviour through sociological, psychological, and rational models, as well as a study of the political context in Bali. A survey of 70 Muslim respondents in Bali provides empirical data on political choice patterns. The survey analysis results show that the sociological dimension is more dominant than the psychological and rational-economic dimensions, with the highest average (32.89). Religious identity, educational background, and organisational ties remain the main considerations in choosing legislative candidates. However, voters also have the flexibility to accept candidates from nationalist and non-Muslim parties if their programmes and track records are considered relevant. These findings indicate that the political preferences of Muslim voters in Bali are multidimensional and pragmatic. Identity remains important, but pragmatic rationality also plays a role. This is influenced by the integration of "menyama braya" as a self-defence strategy to shift their status from "liyan" (the other) to brotherhood by accepting non-Muslim candidates as their political representatives.

Key words: Political Preference, Muslim Voters, Voting Behavior, Bali, Regional Legislative Council (DPRD), House of Representatives (DPR RI).

PENDAHULUAN

Pemilu bukan hanya sekedar prosedur administratif, melainkan menjadi arena kontestasi ideologi, gagasan dan kepentingan yang berlapis. Kontestasi ini tidak akan bermakna tanpa tindakan memilih dari warga negara. Dengan kata lain perilaku pemilih penting untuk menjelaskan bagaimana demokrasi electoral bekerja dalam konteks Indonesia yang plural dan kompleks.

Perilaku memilih dalam pemilu selalu menjadi topik riset menarik karena dapat mencerminkan dinamika sosial dan politik suatu masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih tidak bersifat tunggal melainkan multidimensional. Teori-teori klasik perilaku pemilih, seperti sociological model dari Columbia School (Christoph et al., 1945), psychological model dari Michigan School (Campbell et al., 1960 dalam (F. Kaiser, 2019), serta *rational choice* model dari Anthony Downs (Grofman, 2008) menjelaskan bahwa pilihan politik bisa ditentukan oleh lingkungan sosial, ikatan emosional terhadap partai, maupun pertimbangan rasional terhadap kepentingan pribadi. Dalam konteks Indonesia yang pluralistik, faktor agama dan identitas etnis terbukti memainkan peran penting dalam membentuk perilaku politik seseorang (Mujani, Liddle & Ambardi, 2012).

Bali sebagai salah satu provinsi di Indonesia memiliki karakteristik unik dalam peta politik nasional. Mayoritas penduduk Bali beragama Hindu, sementara umat Muslim hanya berjumlah sekitar 441.454 jiwa atau 10,23% dari total penduduk (BPS, 2024). Posisi sebagai minoritas membuat komunitas Muslim di Bali menghadapi tantangan tersendiri dalam mengartikulasikan aspirasi politiknya. Keterbatasan jumlah populasi Muslim Bali membuat daya tawar politik relatif kecil sehingga sulit menjadi kekuatan penentu dalam pemilihan umum. Sementara Partai Islam yang secara ideologis dianggap dekat dengan umat Islam justru mengalami pergeseran ke arah Post-Islamisme, yakni lebih terbuka terhadap pluralisme dan tidak lagi menjadikan agama sebagai faktor eksklusif (Bayat, 2013). Hal ini mendorong pilihan komunitas Muslim dalam pemilu legislatif tidak hanya dipengaruhi oleh preferensi ideologis, tetapi juga oleh kalkulasi strategis mengenai siapa yang mampu memberikan representasi politik paling efektif di tengah dominasi mayoritas. Fenomena Post-Islamisme yang sebelumnya cenderung diperlakukan sebagai tren nasional, pada studi ini juga terjadi dalam konteks lokal Bali. Sedangkan studi Pradana Boy Zulian and Neni Nur Hayat (2024) menjelaskan bahwa Partai Islam yang sulit berkembang dalam skala nasional berpretensi pada tingkat lokal, akibatnya pemilih Muslim banyak yang memilih partai nasionalis.

Muslim Bali berjumlah sekitar 441.454 jiwa (10, 23% dari total penduduk) yang tersebar di berbagai kabupaten/kota, dengan konsentrasi terbesar terdapat di Denpasar, Buleleng, dan Jembrana. Kehadiran Muslim di Bali memiliki sejarah panjang yang erat kaitannya dengan mobilitas perdagangan, migrasi, serta hubungan antar kerajaan pada masa lampau (Wisarja & Sudarsana, 2023). Meskipun secara jumlah minoritas, komunitas Muslim di Bali diakui telah berkontribusi dalam berbagai sektor kehidupan, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga politik. Distribusi yang tersebar ini dapat mempengaruhi dinamika politik suatu daerah. Berbeda dengan daerah yang konsentrasi umat Islam cukup tinggi, maka peluang keberhasilan untuk mengusung calon legislatif dari komunitas Muslim juga relatif lebih besar. Sementara, di daerah dengan populasi muslim sangat kecil seperti Bali, preferensi pemilih lebih banyak mengarah pada calon dari luar kelompok, baik karena keterbatasan pilihan maupun pertimbangan pragmatis.

Kehadiran Muslim di Bali menunjukkan interaksi panjang antara umat Hindu dan Muslim. Dalam catatan sejarah hubungan antara kerajaan-kerajaan Hindu Bali dengan komunitas Muslim sering kali ditandai oleh dinamika konflik sekaligus kerja sama. Dalam studi Wisarja & Sudarsana (2023), para petani muslim dari kerajaan lain pernah memberikan dukungan politik sekaligus perlindungan permanen kepada kelompok tertentu di Bali, sehingga memungkinkan terbentuknya komunitas muslim yang menetap hingga kini di daerah-daerah seperti Buitan dan Manggis di Karangasem. Komunitas Muslim yang bermukim di Bali kini telah mengakar kuat dan membentuk identitas sosial tersendiri.

Pengalaman sejarah ini mempengaruhi cara pandang Muslim Bali terhadap representasi politik. Mereka tidak sekedar minoritas pasif, melainkan komunitas yang memiliki modal sejarah, sosial, dan kultural dalam membangun posisi politiknya. Meski minoritas, umat Islam di Bali relatif terintegrasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari Interaksi antara umat

Hindu dan Muslim yang diwarnai toleransi, meski sesekali terdapat gesekan akibat isu politik atau ekonomi (Kartini, 2011). Selain toleransi juga solidaritas yang selalu dijaga antara Muslim dan Hindu seperti dikenal dalam praktik *menyama braya* (I. B. S. Arjawa, 2021). Integrasi sosial ini juga berdampak pada pilihan politik yang lebih terbuka terhadap calon legislatif dari luar kelompok agama, sejauh calon tersebut dianggap mampu mengakomodasi kepentingan minoritas. Pada akhirnya identitas agama bukan lagi faktor utama yang menentukan preferensi politik Muslim, namun kalkulasi rasional menjadi pilihan yang tidak bisa dihindari.

Ketika kehadiran partai Islam di Bali tidak lagi populer dan kurang solid akibat konflik internal partai, banyak pemilih Muslim Bali yang merasakan partai Islam tidak lagi menjadi kendaraan politik utama. Suara pemilih Muslim terfragmentasi karena sebagian memilih calon legislatif Muslim dari partai nasionalis, sementara sebagian lainnya mendukung calon non-Muslim yang dianggap memiliki keberpihakan terhadap komunitas Muslim (Pradana Boy Zulian and Neni Nur Hayati, 2024 & Nurjaman, 2023). Hal ini membuat Muslim Bali tidak memperoleh kursi legislatif di pusat dan daerah, hanya sedikit yang menduduki anggota legislatif tingkat dua (KPU Bali, 2024). Kondisi minoritas inilah yang membuat perilaku pemilih Muslim Bali unik dan penting untuk dikaji. Preferensi mereka dalam pemilihan legislatif sering kali mencerminkan dilema antara menjaga solidaritas identitas dan mengejar kepentingan pragmatis.

Dalam kerangka analisis behavioral, perilaku pemilih Muslim Bali dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara faktor sosiologis (identitas agama, etnis, organisasi), psikologis (ikatan emosional dengan partai atau kandidat), serta rasional-ekonomi (program, visi misi, kepentingan pragmatis). Studi ini hendak mengeksplorasi bagaimana preferensi Muslim di Bali menentukan pilihan politik pada pemilu legislatif tahun 2024? Bagaimana analisis sosiokultural menjelaskan preferensi politik minoritas Muslim di Bali?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *quasi mixed methods* atau *mixed method* terbatas, dimana data kuantitatif sebagai data primer dikombinasikan dengan analisis kualitatif berbasis literatur untuk memperkuat interpretasi teoritis dan kontekstual (Yu, 2009). Pendekatan ini digunakan dengan tujuan untuk menjelaskan bahwa preferensi politik tidak hanya dapat dipahami sebagai pilihan rasional yang terukur secara kuantitatif melalui data survey, tetapi juga sebagai hasil dari proses sosial, identitas keagamaan dan politik yang membentuk perilaku pemilih seseorang.

Data primer diperoleh dari hasil survey lapangan dengan melibatkan responden Muslim di beberapa wilayah di Bali. Data sekunder: Literatur akademik, hasil penelitian terdahulu, buku, artikel jurnal, serta dokumen resmi yang membahas teori perilaku pemilih, politik identitas, post-Islamisme, dan konteks sosial-politik Muslim di Bali.

Data kuantitatif dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh melalui survey terhadap 70 responden pemilih muslim di Bali yang tersebar di Kota Denpasar, Kabupaten Buleleng, Klungkung dan Jembrana. Riset dilakukan langsung oleh peneliti pada momentum pemilihan umum legislatif tahun 2024. Meskipun jumlah responden relatif terbatas, survey ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola preferensi politik dan kecenderungan perilaku pemilih Muslim Bali sebagai eksplorasi pemetaan awal yang diperdalam melalui analisis kualitatif, dan bukan untuk melakukan generalisasi statistik terhadap seluruh populasi Muslim di Bali.

Survei dalam studi ini melibatkan indikator perilaku pemilih yang dikelompokkan ke dalam tiga dimensi: (1) sosiologis, (2) psikologis, dan (3) rasional-ekonomi. Selain itu, data sekunder juga mencakup statistik resmi seperti BPS (Badan Pusat Statistik) mengenai jumlah penduduk Muslim di Bali.

Populasi penelitian adalah seluruh pemilih Muslim di Bali yang berjumlah sekitar 441.454 jiwa atau 10,23% dari total penduduk Bali (BPS, 2024). Karena keterbatasan sumber daya, penelitian ini menggunakan non-probability sampling dengan pendekatan purposive sampling, yakni memilih responden yang memenuhi kriteria:

1. Terdaftar sebagai pemilih pada pemilu legislatif terakhir.

2. Beragama Islam dan berdomisili di wilayah Bali.
3. Bersedia mengisi kuesioner penelitian.
4. Jumlah sampel yang digunakan adalah 70 orang, dengan komposisi beragam dari segi jenis kelamin, usia, pendidikan, dan pekerjaan.

Instrumen Penelitian

Instrumen utama berupa kuesioner survei yang terdiri dari sejumlah pernyataan dengan skala Likert (1 = sangat tidak setuju, 4 = sangat setuju). Indikator yang diukur mencakup:

1. Dimensi Sosiologis: latar belakang pendidikan, agama, etnis, keluarga, organisasi, dan status sosial.
2. Dimensi Psikologis: identifikasi partai, loyalitas ideologis, persepsi terhadap kandidat, kejujuran, rekam jejak, dan kompetensi politik.
3. Dimensi Rasional-Ekonomi: orientasi program, manfaat ekonomi, dukungan terhadap profesi, kontribusi organisasi, serta kepentingan pragmatis.

Sebelum didistribusikan, kuesioner dilakukan instrumen uji validitas dan reabilitas. Validitas isi ditetapkan melalui kajian literatur dan kesesuaian indikator dan konsep teoritis tentang perilaku pemilih. Validitas empiris diuji dengan menggunakan korelasi item-total dimana seluruh item pernyataan memiliki nilai r -hitung lebih besar dari r -tabel yakni (0,023) sehingga item dinyatakan valid dan layak digunakan untuk analisis berikutnya. Sedangkan reabilitas instrumen diukur dengan koefisien Cronbach's Alfa dengan nilai sebesar (0,731) menunjukkan instrumen memiliki reliabilitas yang baik. Sebagaimana mengacu pada Nunnally & Berstein 1994 dalam (Lalanne, 2017) bahwa nilai alfa di atas, 0, 70 memadai untuk penelitian sosial. Mengingat responden terbatas pengujian ini dilakukan dalam kerangka eksploratif sehingga hasilnya tidak dimaksudkan untuk mengklaim struktur konstruksi yang final, melainkan untuk memastikan bahwa instrumen memiliki kelayakan dasar dalam mengukur konsep yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Kajian Literatur: menelaah buku, jurnal, dan dokumen yang relevan. Survei: penyebaran kuesioner kepada responden terpilih. Dokumentasi: pengumpulan data statistik resmi dari BPS dan KPU.

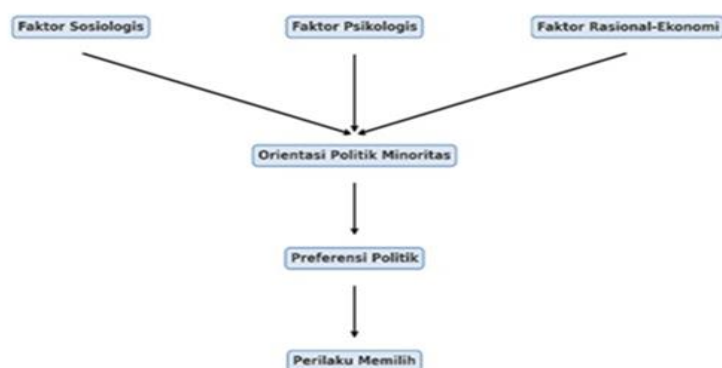
Teknik Analisis Data

Analisis Kualitatif (Literatur): menggunakan analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait perilaku pemilih, preferensi politik, politik identitas, dan post-Islamisme.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perilaku memilih minoritas Muslim di Bali tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses bertahap yang dibentuk melalui interaksi antara faktor sosiologis, psikologis dan rasional ekonomi. Ketiga faktor ini saling berkaitan mempengaruhi cara berfikir politik pemilih yang membentuk orientasi politik tentang bagaimana cara pandang minoritas Muslim di Bali terhadap politik. Orientasi politik minoritas ini mempengaruhi preferensi politik yang diwujudkan dalam perilaku memilih. Prosesnya dapat dijelaskan dalam gambar berikut di bawah ini.

Gambar 1. Kerangka Konseptual Perilaku Politik Pemilih Muslim Bali pada Pemilu 2024



Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Preferensi Politik Muslim di Bali: Perilaku Multidimensi

Survei yang dilakukan terhadap 70 responden Muslim di Bali menunjukkan beberapa karakteristik penting yang dapat dijadikan pijakan untuk memahami perilaku politik Muslim di Bali. Dari sisi jenis kelamin, mayoritas responden adalah perempuan (68,6%), sementara laki-laki berjumlah 31,4%. Temuan ini menarik karena memperlihatkan dominasi perempuan dalam survei, yang bisa mencerminkan realitas sosial di mana perempuan Muslim minoritas di Bali cukup aktif dalam partisipasi politik, terutama sebagai pemilih. Dominasi perempuan juga dapat dikaitkan dengan meningkatnya kesadaran politik di kalangan perempuan sebagai ibu rumah tangga, perempuan sebagai pekerja dan perempuan sebagai aktivis organisasi.

Temuan ini mengkritik studi-studi awal perilaku pemilih yang cenderung memposisikan perempuan sebagai pemilih pasif yang preferensi politiknya dibentuk melalui keluarga atau tokoh laki-laki (Lazarsfeld et al., 1944; Berelson et al., 1954). Dalam Tradisi tersebut perempuan diasumsikan memiliki minat politik yang rendah (Campbell et al., 1960). Kritik lainnya perempuan tidak memiliki suara politik independent, karena demokrasi liberal yang dibangun dengan dasar pembedaan maskulin dan feminisme membuat perempuan tidak diperlakukan sebagai subyek politik yang penuh (Anne Phillips, 1995; Pateman, 2018). Dalam temuan studi ini menunjukkan sebuah pergeseran posisi dimana perempuan bukan hanya sekedar *voters* sebagai pemilih pasif sebagaimana disebutkan dalam tradisi klasik, melainkan perempuan harus dipahami sebagai agen politik otonom yang membentuk preferensi melalui pengalaman sosial pendidikan dan organisasi (Young, 1990). Hal ini selaras dengan *background* responden perempuan dalam studi ini yang kebanyakan adalah aktivis Aisyiyah-Muhammadiyah dan komunitas perempuan Muslim lainnya. Organisasi seperti Aisyiyah dan komunitas Muslim lainnya bukan sekedar organisasi keagamaan semata, namun bisa menjadi ruang pendidikan kewargaan, ruang memproduksi kepemimpinan perempuan dan ruang untuk mengartikulasikan kepentingan publik. Organisasi masyarakat semacam ini dalam konsep Fraser (1990) dalam (Scandrett, 2020) disebut sebagai *counter public* yakni ruang publik alternatif yang memungkinkan kelompok terpinggirkan seperti perempuan dan minoritas dapat membangun suara politiknya di dalam ruang organisasi tersebut.

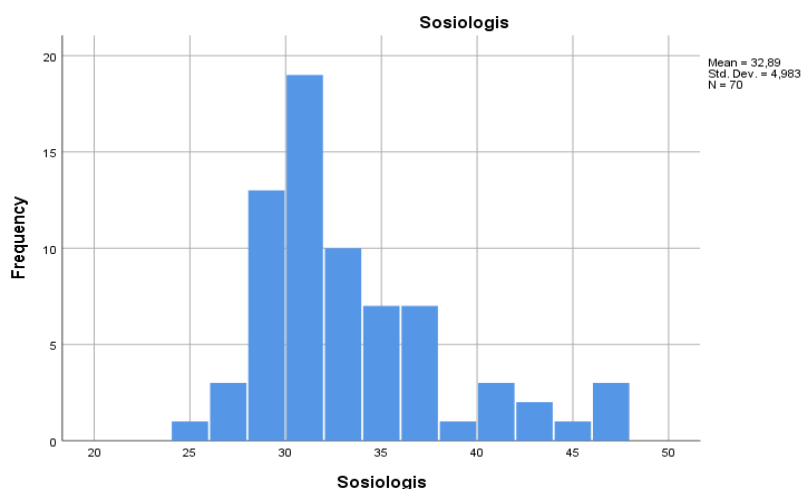
Dari sisi pendidikan mayoritas responden berpendidikan sarjana (52,9%), diikuti pascasarjana (14,3%), SMA (21,4%), dan diploma (11,4%). Tingginya tingkat pendidikan ini menunjukkan bahwa pemilih Muslim di Bali memiliki kemampuan kritis dalam menilai kandidat, partai politik, maupun program yang dikampanyekan oleh caleg. Tingkat pendidikan tinggi juga berperan penting dalam membentuk perilaku pemilih yang lebih otonom dan reflektif. Melalui pendidikan kapasitas kognitif, pengetahuan politik dan efikasi politik individu semakin meningkat, hal ini berimplikasi kepada pemilih yang cenderung membuat keputusan didasarkan pada pertimbangan program, rekam jejak kandidat dan isu substantif, bukan sekedar mengikuti otoritas tradisi atau relasi sosial umumnya (S. Verba, K. Schlozman, 1996). Demikian profil pendidikan ini menjadi salah satu faktor yang mendorong munculnya fleksibilitas politik di kalangan Muslim Bali.

Kedua karakteristik dominasi perempuan dan tingkat pendidikan tinggi menjadi parameter untuk memahami preferensi politik pemilih Muslim di Bali. Perempuan Muslim yang relatif terdidik dan terorganisasi memiliki kecenderungan mempertimbangkan aspek rasional dan programatik dibanding sekedar loyalitas emosional terhadap partai politik. Meski demikian identitas agama tetap menjadi bingkai utama dalam melihat kandidat legislatif.

Dimensi Sosiologis

Hasil uji deskriptif menunjukkan bahwa dimensi sosiologis memperoleh rata-rata tertinggi (mean 32,89) dibanding dimensi lainnya. Hal ini menegaskan bahwa faktor sosial dan identitas masih menjadi determinan utama dalam perilaku pemilih Muslim Bali. Secara lebih rinci, survei menunjukkan bahwa mayoritas responden memilih calon legislatif berdasarkan pendidikan, status sosial-ekonomi, dan agama. Namun, faktor kekerabatan dan usia tidak lagi menjadi pertimbangan utama. Hal ini berbeda dengan pola tradisional di mana politik kekerabatan (*patronase keluarga*) biasanya cukup berpengaruh.

Gambar 2. Dimensi Sosiologis



Tabel 1. Dimensi Sosiologis

Kategori	Frekuensi	Persentase
Tinggi	13	18,6
Sedang	54	77,1
Rendah	3	4,3
Total	70	100,0

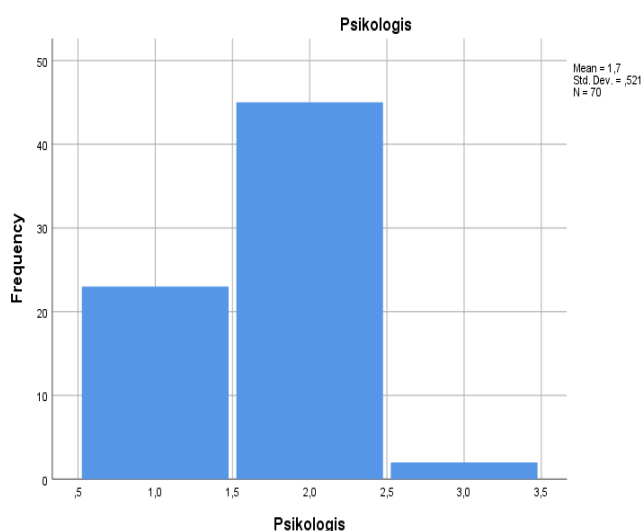
Sumber: Olah Data Peneliti tahun 2025.

Faktor *agama* memiliki posisi khusus. Sebagai kelompok minoritas, pemilih Muslim merasa penting untuk memilih calon legislatif yang memiliki kedekatan dengan komunitas mereka, baik melalui identitas keagamaan maupun afiliasi organisasi Islam. Ikatan dengan organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan Aisyiyah atau yang lainnya turut memperkuat orientasi politik berbasis identitas. Namun orientasi tersebut tidak bersifat eksklusif, melainkan sering dipadukan dengan pertimbangan kualitas individu kandidat. Dengan demikian, meskipun faktor sosiologis masih dominan, orientasinya cenderung inklusif. Pemilih Muslim di Bali tidak serta-merta menolak calon non-Muslim, tetapi menempatkan identitas agama sebagai salah satu filter awal sebelum mempertimbangkan faktor lain.

Dimensi Psikologis.

Dimensi psikologis memperoleh mean 29,84. Angka ini lebih rendah dari dimensi sosiologis, tetapi tetap cukup signifikan. Dimensi ini mencakup faktor *party identification* (ikatan emosional terhadap partai), persepsi terhadap kandidat, serta loyalitas ideologis. Hasil survei menunjukkan bahwa loyalitas pemilih Muslim terhadap partai Islam relatif lemah. Pemilih tidak serta-merta memilih partai Islam, meskipun secara ideologis dianggap lebih dekat. Sebaliknya, banyak responden yang terbuka untuk memilih partai nasionalis seperti PDI-P, Golkar, atau Gerindra, terutama bila kandidat yang diusung dianggap memiliki kompetensi dan rekam jejak baik.

Gambar 3. Dimensi Psikologis



Sumber: Olah Data Peneliti, Tahun 2025.

Tabel 2. Dimensi Psikologis

Kategori	Frekuensi	Prosentase
Tinggi	23	32,9
Sedang	45	64,3
Rendah	2	2,9
Total	70	100,0

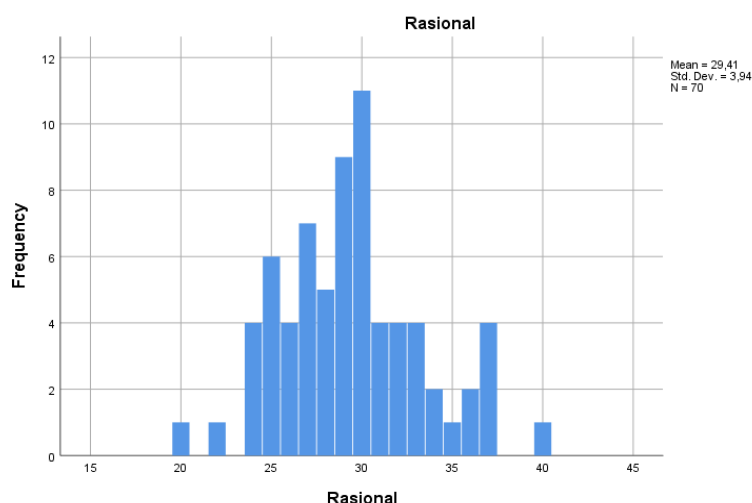
Sumber: Olah Data Peneliti, Tahun 2025

Lebih jauh, persepsi terhadap kandidat menjadi faktor penentu yang lebih kuat. Pemilih Muslim Bali menilai aspek kejujuran, integritas, visi-misi, dan pengalaman kandidat sebagai pertimbangan utama. Hal ini konsisten dengan model psikologis Michigan School (Campbell et al., 1960) yang menekankan pentingnya citra kandidat dalam memengaruhi perilaku pemilih. Dengan demikian, dimensi psikologis dalam konteks Muslim Bali lebih bersifat personalisasi politik ketimbang loyalitas partai. Pemilih lebih peduli pada figur individu daripada label partai yang melekat pada kandidat.

Dimensi Rasional-Ekonomi

Dimensi rasional-ekonomi memperoleh mean 29,41, sedikit lebih rendah dari dimensi psikologis. Namun, dimensi ini tetap penting karena memperlihatkan pola pragmatisme politik di kalangan pemilih Muslim Bali. Mayoritas responden menilai bahwa calon legislatif harus memiliki orientasi program ekonomi yang jelas, termasuk dukungan terhadap profesi dan organisasi mereka. Dengan kata lain, pemilih tidak hanya memilih berdasarkan identitas atau loyalitas emosional, tetapi juga mempertimbangkan apakah kandidat mampu memberikan manfaat nyata bagi kehidupan sehari-hari mereka.

Gambar 4. Dimensi Rasional-Ekonomi



Sumber: Olah Data Peneliti, Tahun 2025

Tabel 3. Dimensi Rasional Ekonomi

Kategori	Frekuensi	Prosentase
Tinggi	16	22,9
Sedang	53	75,7
Rendah	1	1,4
Total	70	100,0

Sumber: Olah Data Peneliti, Tahun 2025

Temuan lain yang menarik adalah keterbukaan pemilih Muslim Bali terhadap kandidat non-muslim bila program yang ditawarkan relevan dengan kepentingan mereka. Hal ini menunjukkan adanya strategi bertahan sebagai minoritas, di mana pragmatisme menjadi cara untuk memastikan aspirasi tetap terwakili meskipun jumlah mereka kecil. Dalam perspektif *rational choice* Downs (1957), pemilih Muslim Bali berperilaku layaknya aktor rasional yang berusaha memaksimalkan kepentingan kolektif mereka, dengan membuka pilihan terhadap kandidat di luar kelompok identitas mereka.

Dari beberapa temuan tersebut di atas, preferensi pemilih Muslim di Bali menunjukkan perilaku yang multidimensi dan pragmatis. Identitas agama tetap berfungsi sebagai jangkar sosiologis, namun dalam prakteknya mereka sangat rasional dalam mengevaluasi kandidat berdasarkan kompetensi dan manfaat programatik. Hal ini menegaskan dalam konteks masyarakat plural strategi politik yang inklusif berbasis program lebih jauh efektif daripada pendekatan eksklusivitas agama.

Analisis Dialektika Perilaku Politik Muslim di Bali; Antara Hegemoni, Identitas dan Negosiasi Eksistensial

Mengapa perilaku pemilih Muslim di Bali bersifat adaptif, inklusif dan terbuka terhadap calon

non-Muslim. Untuk menjawab pertanyaan ini memerlukan pengetahuan tentang siapa Muslim Bali dan keberadaannya. Secara fundamental, perilaku politik Muslim di Bali tidak dapat dilepaskan dari posisi mereka sebagai kelompok minoritas di tengah sosio kultural yang hegemonik. Dalam perspektif sosiologis, umat Muslim di Bali sering diposisikan sebagai “liyan” (*the other*) dalam bahasa Edward Said (1978) yakni sebuah kelompok yang identitas keagamaannya berada di luar arus utama Hindu Bali yang mendominasi ruang publik dan politik seperti sistem banjar dan adat. Kelompok dominan seringkali membangun narasi tentang “liyan” terhadap kelompok lain untuk menegaskan identitas dan kekuasaan mereka (M. J. Labelle, 2020). Brigitta Hauser-Schäublin (2014) menjelaskan bahwa status “liyan” di Bali tidak selalu berarti diskriminasi terbuka, melainkan sebuah “kondisi sosiologis” di mana kelompok minoritas harus selalu melakukan penyesuaian (negosiasi) terhadap norma mayoritas agar bisa diterima dalam ruang publik. Sebagai “liyan” Muslim Bali menghadapi sejumlah tantangan representasi yang nyata, di mana akses terhadap struktur kekuasaan formal sering kali terhambat oleh tembok-tembok identitas sosio kultural yang tebal. Hal ini bertendensi pada pemilih mayoritas yang mungkin enggan memilih kandidat Muslim karena dianggap tidak merepresentasikan nilai-nilai inti “Kebalian”. Sementara sebagai “liyan” Muslim di Bali terus menerus berjuang membuktikan diri agar bisa diterima oleh mayoritas meski dengan tetap menjaga identitas keislamannya.

Posisi Muslim di Bali yang terjebak dalam dialektika antara statusnya sebagai “liyan” di tengah hegemoni sosiokultural Hindu-Bali dan tuntutan untuk berintegrasi. Keinginan berkumpul dan berorganisasi menjadi sangat penting untuk menguatkan identitas demi perlindungan kelompok. Konteks inilah yang menjadikan alasan mengapa skor dimensi sosiologis (32, 29) lebih tinggi dari dimensi yang lain yang menunjukkan pemilih merasa perlu kompak demi perlindungan kelompok. Akan tetapi bergabung dalam kelompok dan organisasi tidaklah cukup, selama aspirasi minoritas belum diterima oleh kelompok mayoritas. Mereka menyadari statusnya sebagai “liyan” yang hanya 10,23% melawan arus mayoritas adalah mustahil. Untuk itu berintegrasi adalah strategi berinteraksi dengan lingkungan mayoritas agar kelompok mayoritas dapat menerima aspirasi minoritas. Agar memiliki bahasa yang serupa dengan mayoritas, Muslim Bali harus menunjukkan diri dengan sikap, tindakan bahwa meskipun agama berbeda, mereka mengakui sebagai saudara. Konsep ini melunturkan status “liyan” yang kaku menjadi hubungan persaudaraan yang cair melalui kearifan lokal Bali yang disebut “menyama braya” (Picard, 2002). Konsep persaudaraan ini menjadi mekanisme katarsis yang mengubah ketegangan identitas menjadi kooperasi politik. Sesuai dengan temuan dalam dimensi sosiologis bahwa Identitas agama tetap penting bagi Muslim Bali, namun berintegrasi menyebrangi jembatan (negosiasi) dengan mendukung sistem atau kandidat yang menjamin harmoni adalah pilihan politik realistis sebagai bentuk semangat persaudaraan. Oleh karena mengapa pemilih Muslim di Bali memiliki keterbukaan yang tinggi terhadap kandidat non-Muslim atau partai nasionalis. Hal itu diambil sebagai upaya pragmatis dan sepanjang kandidat dianggap mampu mempraktikkan nilai persaudaraan dalam budaya yang sama.

Konsep kearifan Bali yang dikenal dengan “menyama braya” menjadi strategi yang kuat hingga masuk ke ranah emosional dan kekeluargaan bukan sekedar hukum formal. Implikasinya bagi pemilih Muslim, prinsip ini digunakan untuk membenarkan pilihan politik mereka pada kandidat non-Muslim yang dianggap saudara yang bisa menjaga mereka. Sementara bagi kandidat yang lain, “menyama braya” sering menjadi *platform* kampanye. Kandidat Muslim yang sukses biasanya mereka yang mampu menunjukkan dan mempraktikkan “menyama braya” yakni ikut serta dalam kegiatan sosial budaya lokal Bali sehingga status “liyan” nya berubah menjadi “saudara”.

Dalam temuan riset ini pemilih Muslim tidak lagi fanatik pada identitas agama, melainkan berhitung secara realistis pragmatis atau disebut dengan model pragmatis identitas. Artinya pemilih Muslim Bali tetap berpijak pada nilai-nilai sosiologis keagamaan sebagai identitas internal yang menjadi jangkar pengaman keyakinan beragama, namun menggunakan paradigma “menyama braya” dan pilihan rasional dalam tindakan politik eksternal. Dapat disimpulkan bahwa representasi politik Muslim Bali bersifat negosiasional yang menyeimbangkan antara harga diri identitas dan relitas bertahan hidup dalam masyarakat pluralistik.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku politik pemilih Muslim di Bali bersifat multidimensional dan kompleks. Dengan jumlah sekitar 441.454 jiwa atau 10,23% dari total penduduk Bali (BPS, 2024), umat Muslim merupakan kelompok minoritas yang menghadapi tantangan representasi politik di tengah dominasi partai-partai nasionalis. Survei terhadap 70 responden Muslim Bali memperlihatkan bahwa preferensi politik mereka dibentuk oleh interaksi antara faktor sosiologis, psikologis, dan rasional-ekonomi. Pertama, dimensi sosiologis terbukti paling dominan (mean 32,89). Identitas agama, pendidikan, dan keterikatan dengan organisasi keagamaan tetap menjadi filter utama dalam menentukan pilihan politik. Namun, orientasi ini tidak bersifat eksklusif, melainkan dikombinasikan dengan faktor lain. Kedua, dimensi psikologis (mean 29,84) memperlihatkan bahwa loyalitas partai Islam lemah, sementara orientasi terhadap kandidat kuat. Pemilih lebih menilai kualitas personal calon legislatif—seperti integritas, visi-misi, dan rekam jejak—daripada sekadar label partai. Ketiga, dimensi rasional-ekonomi (mean 29,41) menegaskan bahwa pragmatisme politik menjadi strategi bertahan Muslim Bali sebagai minoritas. Pemilih terbuka pada kandidat non-Muslim atau partai nasionalis selama program dan kebijakan yang ditawarkan relevan dengan kepentingan mereka. Secara integratif, perilaku pemilih Muslim Bali mencerminkan kompromi antara solidaritas identitas dan kalkulasi pragmatis. Identitas agama tetap penting, tetapi bukan satu-satunya faktor. Rasionalitas programatik dan persepsi terhadap kandidat sama-sama berperan dalam membentuk preferensi politik. Preferensi politik Muslim Bali tidak terlepas dari integrasi “menyama braya” sebagai strategi pertahanan diri untuk menggeser statusnya dari “liyan” *the other* menjadi saudara dengan menerima calon Non Muslim sebagai representasi politiknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anne Phillips. (1995). *The Politics of Presence*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1093/0198294158.001.0001>
- Bayat, A. (2013). *Post-Islamism: The Changing Faces of Political Islam*. Oxford University press.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S2151348100056925>
- Brigitta Hauser-Schäublin, D. D. H. (2014). *Introduction: Negotiating Religious Identities within Majority-Minority Relationships in Bali and Lombok*.
https://doi.org/https://doi.org/10.1163/9789004271494_002
- Bryman, A. (2012). *Social Research Methods, 4th Edition*.
<https://www.semanticscholar.org/paper/Social-Research-Methods%2C-4th-Edition-Bryman/432eb124202ead1410aaff653847ba8a093bdf4c>
- Christoph, V. F., Lazarfeld, P. F., Berelson, B., & Gaudet, H. (1945). The People's Choice. *The American Catholic Sociological Review*, 6(3), 188. <https://doi.org/10.2307/3707538>
- F. Kaiser, M. W. (2019). *The Campbell Paradigm as a Behavior-Predictive Reinterpretation of the Classical Tripartite Model of Attitudes*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000364>
- Grofman, B. (2008). Anthony Downs (1930 -). In *Readings in Public Choice and Constitutional Political Economy* (pp. 91–95). Springer US. https://doi.org/10.1007/978-0-387-75870-1_6
- I. B. S. Arjawa, Z. Z. (2021). *The Social Integration of Hindu and Muslim Communities: The Practice of “Menyama-Braya” in Contemporary Bali*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36712/SDI.V28I1.10914>
- Kartini, I. (2011). DINAMIKA KEHIDUPAN MINORITAS MUSLIM DI BALIe. *Ilmu Sosial Indonesia*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jmi.v37i2.635>
- Lalanne, C. (2017). *Statistical Analysis of Questionnaires: A Unified Approach Based on R and Stata*. <https://doi.org/https://doi.org/10.18637/JSS.V082.B01>
- M. J. Labelle. (2020). *On the Decolonial Beginnings of Edward Said*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S1479244320000554>
- Mujani, Liddle, & A. (2012). *Kuasa rakyat; analsiis perilaku memilih dalam pemilu legislatif dan*



- presiden Indonesia pasca Orde Baru* (Lukman Junaidi (ed.); 1st ed.). Mizan Publika.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41213/1/Scan.pdf>
- P. Kuusela. (2012). Maxwell, Joseph A. 2011. "Realist Approach for Qualitative Research". London: Sage. *Qualitative Sociology Review*. <https://doi.org/https://doi.org/10.18778/1733-8077.8.3.06>
- Pateman, C. (2018). *Beyond the Sexual Contracte*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781351307246-2>
- Picard, M. (2002). *Religion, tradition et culture. La construction dialogique d'une identité balinaise M. Picard*. <https://doi.org/https://doi.org/10.4000/LHOMME.174>
- Pradana Boy Zulian and Neni Nur Hayati. (2024). Bleak Future for Islamic Parties in Indonesia after the 2024 Election. *Perspective*. https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2024-37-bleak-future-for-islamic-parties-in-indonesia-after-the-2024-election-by-pradana-boy-zulian-and-neni-nur-hayati/?utm_source=chatgpt.com
- S. Verba, K. Schlozman, H. E. B. (1996). *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.2307/2152095>
- Scandrett, E. (2020). *Class, Gender and Identity: Axes of Structure and Difference in Subaltern Counterpublics*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1332/POLICYPRESS/9781529201406.003.0002>
- Wisarja, I. K., & Sudarsana, I. K. (2023). Tracking the factors causing harmonious Hindu-Islamic relations in Bali. *Cogent Social Sciences*, 9(2).
<https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2259470>
- Young, I. (1990). *Justice and the Politics of Difference*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.2307/j.ctvcm4g4q>
- Yu, C. H. A. (2009). *Book Review: Creswell, J., & Plano Clark, V. (2007). Designing and Conducting Mixed Methods Research. Thousand Oaks, CA: Sage*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1094428108318066>